

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya pada pemilu 2024. Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi dari penyelenggara maupun masyarakat umum, sedangkan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama bahkan di prioritaskan sesuai dengan UU yang berlaku untuk menentukan pilihannya. Saat ini hak penyandang disabilitas dirasa belum sepenuhnya terpenuhi, salah satunya adalah hak politik; hak memilih, hak dipilih dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang diimplementasikan dalam pemilihan umum. Teori yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia dan teori Hak Politik, dalam hal ini hak politik merupakan hak politik berupa hak memilih dalam pemilihan umum dan turut serta dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang merupakan hak mutlak warga negara termasuk penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan Teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data digunakan secara interaktif dengan jenis analisis data Miles & Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa upaya dari KPU Kota Tasikmalaya dan juga BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu dalam rangka memenuhi hak politik penyandang disabilitas tunanetra melalui sosialisasi yang didalamnya terdapat cara memilih/mencoblos, kemudian sosialisasi surat suara, pemberitahuan pendampingan pada saat memilih di bilik suara. Namun tetap saja dalam implementasinya hal ini masih belum optimal dibuktikan dengan adanya beberapa TPS yang masih belum ramah disabilitas dan juga surat suara yang tidak menggunakan template brailee, terutama pada bagian surat suara calon-calon legislatif. Sementara disisi lain, pemilih penyandang tunanetra berharap hak memilih mereka terpenuhi semuanya walaupun mereka merasa tidak keberatan dengan hal tersebut karena diringankan dengan adanya pendampingan dari keluarga atau orang yang bisa dipercaya.

Kata kunci : Pemilu, Disabilitas Tunanetra, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Currently, the rights of persons with disabilities have not been fully fulfilled, one of which is political rights; The right to vote, the right to be elected in a policy-making process implemented in elections. This research proposal is entitled "Fulfillment of Political Rights of People with Disabilities in Tasikmalaya City in the 2024 presidential election. This study aims to determine how to fulfill the political rights of people with disabilities in Tasikmalaya City in the 2024 election. Persons with disabilities are often discriminated against by organizers and the general public, while persons with disabilities have the same rights and even prioritized in accordance with applicable laws to make their choices. The theory used in this research proposal is Human Rights theory and Political Rights theory, in this case political rights are political rights in the form of the right to vote in general elections and participate in a decision-making process which is an absolute right of citizens including people with disabilities. The method used in this research proposal is a qualitative method with interview and observation techniques to obtain information and use a case study approach. Data analysis techniques are used interactively with Miles & Huberman's types of data analysis: data reduction, data presentation, and verification. The results of this study found that there were several efforts from the Tasikmalaya City KPU and also BAWASLU as the organizer and supervisor of the election in order to fulfill the political rights of people with visual disabilities through socialization in which there was a way to vote/vote, then socialization of ballots, notification of assistance when voting in the voting booth. But still, in its implementation, this is still not optimal, as evidenced by the existence of several polling stations that are still not disability-friendly and also ballots that do not use braille templates, especially in the voting beacon section of legislative candidates. Meanwhile, on the other hand, visually impaired voters hope that their voting rights will be fulfilled even though they do not object to this because it is alleviated by the assistance of a family or a trustworthy person.

Keywords : Elections, Disability, Human Rights